

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2015

Jl. Pengadilan - Padang Kempas Kab. Kaur

Bintuhan - Bengkulu

Telp. (0739) 6180035 Fax. (0739) 6180034

e-mail : keu.pnbth@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2015

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Pengadilan - Padang Kempas Kab. Kaur

Telp. (0739) 6180035 Fax. (0739) 6180034

Bintuhan - Bengkulu

e-mail : keu.pnbth@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Bintuhan adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bintuhan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Bintuhan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bintuhan, 11 Januari 2016

Kuasa Pengguna Anggaran, 
Sekretaris,



MERI MERYANTO, SH

NIP. 197203021993031002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	iv
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	3
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	24
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	34
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Ekuitas	40
F. Pengungkapan Penting Lainnya	42

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2015 dan 2014	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2015 dan 2014	11
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	17
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat.....	18
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2015	19
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2015 dan 2014	19
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2015	20
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2015	20
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014.....	21
Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014	21
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014	22
Tabel 12 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014.....	24
Tabel 13 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	25
Tabel 14 Rincian Belanja Dibayar di Muka.....	25
Tabel 15 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember 2014	26
Tabel 16 Rincian Aset Tetap.....	27
Tabel 17 Rincian Saldo Tanah	28
Tabel 18 Rincian Aset Lainnya.....	31
Tabel 19. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 2014.....	33
Tabel 20. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	33
Tabel 21.....	50

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Bintuhan

Jl. Pengadilan - Padang Kempas Kab. Kaur Bintuhan - Bengkulu

Telp. (0739) 6180035 Fax. (0739) 6180034 e-mail : keu.pnbth@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bintuhan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bintuhan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bintuhan, 11 Januari 2016

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2015 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 4.477.080 atau mencapai 100 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.4.477.080.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp. 2.800.042.708 atau mencapai 95,93 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.2.918.688.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2015 dan 2014 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2015 dan 2014
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2015			TA 2014
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	4.477.080	4.477.080	100	2.984.720
Belanja Negara	2.918.688.000	2.800.042.708	95,93	2.332.139.589

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2015 dan 2014 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp.6.394.762.611, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.3.868.000,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.6.394.762.611; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.8.212.403.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.0 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.0 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp.6.406.843.014.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2015 dan 2014 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2015 dan 2014
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2015	2014	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	3.868.000	5.640.080	(1.772.080)	31,41
Aset Tetap	6.394.762.611	6.210.458.378	184.304.233	2,96
Aset Lainnya	8.212.403	18.393.586	(10.181.183)	(55,35)
Jumlah Aset	6.406.843.014	6.234.492.044	172.350.970	2,76
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	0	11.100.924	(11.100.924)	(100)
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	0	11.100.924	(11.100.924)	(100)
Ekuitas Dana				
Ekuitas	6.406.843.014	6.223.391.120	183.451.894	2,94
Jumlah Ekuitas Dana	6.406.843.014	6.223.391.120	183.451.194	2,94
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	6.406.843.014	6.234.492.044	172.350.970	2,76

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.4.477.080, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 2.717.290.814,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(2.712.813.734) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0 dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. (2.712.813.734)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp. 6.223.391.120 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (2.712.813.734) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 2.896.265.628 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp. 6.406.843.014.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2015, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2015 DAN 2014 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2015		% thd Angg	TA 2014
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	4,477,080	4,477,080	100.00	2,984,720
JUMLAH PENDAPATAN		4,477,080	4,477,080	100.00	2,984,720
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	2,023,611,000	1,957,106,218	96.71	1,894,133,289
Belanja Barang	B.4	468,077,000	420,528,750	89.84	438,006,300
Belanja Modal	B.5	427,000,000	422,407,740	98.92	-
JUMLAH BELANJA		2,918,688,000	2,800,042,708	95.93	2,332,139,589

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

NERACA

PER 31 Desember 2015 DAN 2014

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	4,477,080
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	3,868,000	1,163,000
Jumlah Aset Lancar		3,868,000	5,640,080
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	306,034,347	205,334,347
Peralatan dan Mesin	C.15	1,445,628,368	1,172,570,628
Gedung dan Bangunan	C.16	6,066,248,000	6,066,248,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	149,350,000	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(1,572,498,104)	(1,233,694,597)
Jumlah Aset Tetap		6,394,762,611	6,210,458,378
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	72,773,943	72,773,943
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(64,561,540)	(54,380,357)
Jumlah Aset Lainnya		8,212,403	18,393,586
JUMLAH ASET		6,406,843,014	6,234,492,044
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	11,100,924
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.26	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	11,100,924
JUMLAH KEWAJIBAN		-	11,100,924
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar	C.29	-	(5,460,844)
Ekuitas Dana Investasi	C.30	-	6,228,851,964
Ekuitas	C.31	6,406,843,014	-
JUMLAH EKUITAS DANA		6,406,843,014	6,223,391,120
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6,406,843,014	6,234,492,044

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2015 DAN 2014
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	4,477,080	-
JUMLAH PENDAPATAN		4,477,080	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1,950,482,374	-
Beban Persediaan	D.3	16,435,000	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	204,834,000	-
Beban Pemeliharaan	D.5	66,628,000	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	129,926,750	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	348,984,690	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		2,717,290,814	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2,712,813,734)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.11	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(2,712,813,734)	-
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNPB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(2,712,813,734)	-

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2015 DAN 2014
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
EKUITAS AWAL	E.1	6,223,391,120	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2,712,813,734)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP	E.4	-	-
KOREKSI ATAS BEBAN	E.5	-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN -- HIBAH MASUK/KELUAR	E.7	-	-
Jumlah Lain-Lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		2,896,265,628	
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		183,451,894	
EKUITAS AKHIR	E.8	6,406,843,014	-

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akruwal pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Bintuhan

Visi Pengadilan Negeri Bintuhan adalah Visi Pengadilan Negeri Bintuhan adalah TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG, yang bertujuan agar Pengadilan Negeri Bintuhan menjadi lembaga yang dihormati dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Negeri Bintuhan adalah

- 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan.
- 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
- 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- 1. Pimpinan pengadilan secara berkala mengadakan rapat dengan para Hakim, Pejabat fungsional maupun Pejabat Struktural serta seluruh Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bintuhan.
- 2. Pemahaman dan kesadaran terhadap apa yang menjadi tugas dan kewajiban masing-masing personil.

3. Adanya kerjasama dalam tim dari seluruh personil baik dalam satu bagian atau kepaniteraan maupun sesama bagian atau kepaniteraan lainnya.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Bintuhan adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis

lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan Hibah
: Rp. 4.477.080*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 4.477.080 atau mencapai 100 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 4.477.080. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Bintuhan adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	4.477.080	4.477.080	100,00
Total Pendapatan			4.477.080	100,00

Pembayaran Persekot gaji An.Asep Koswara,SH.,HM. Senilai Rp.373.090,- selama 12 bulan yang terakhir pembayarannya pada bulan Desember 2015.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.492.360 atau 66,67 persen dibandingkan TA 2014.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2015 dan 2014 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2015 dan 2014
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2015	2014	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	4.477.080	2.984.720	1.492.360	66,67
Total Pendapatan		4.477.080	2.984.720	1.492.360	66,67

Kenaikan Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.492.360 karena persekot gaji dibayar selama 20 bulan dimulai dari Mei s/d Desember 2014 dan pada tahun 2015 dibayar selama 12 bulan dari Januari s/d November 2015 dan untuk bulan Desember adalah batas akhir pembayaran persekot gaji tersebut.

B.2. Belanja

*Realisasi Belanja
Negara : Rp.
2.800.042.708*

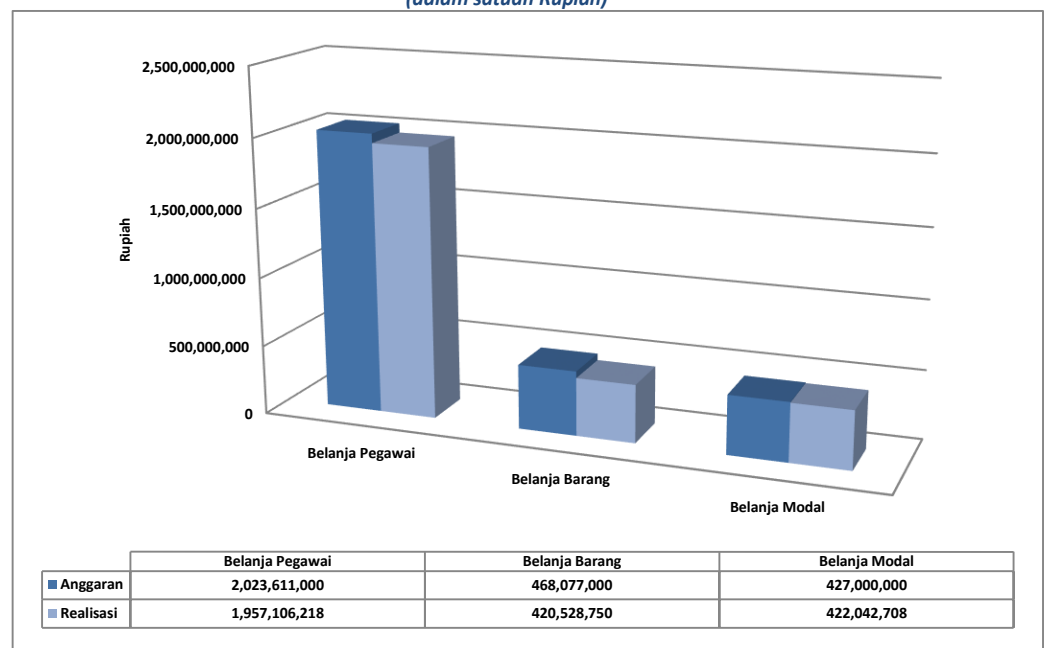
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Bintuhan per 31 Desember TA 2015 adalah sebesar Rp. 2.800.042.708 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 95,93% dari anggaran senilai Rp. 2.918.688.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2015		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2,023,611,000	1,957,106,218	96.71
Belanja Barang	468,077,000	420,528,750	89.84
Belanja Modal	427,000,000	422,407,740	98.92
Total Belanja Kotor	2,918,688,000	2,800,042,708	95.93
Jumlah	2,918,688,000	2,800,042,708	95.93

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2015
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2015 & 2014

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 467.903.119 atau sebesar 20,06 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama.

Perbandingan realisasi belanja TA 2015 dan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2015	REALISASI TA 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1,957,106,218	1,894,133,289	3.32
Belanja Barang	420,528,750	438,006,300	(3.99)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	422,407,740	-	-
Jumlah	2,800,042,708	2,332,139,589	20.06

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi Belanja
Pegawai : Rp.
1.957.106.218*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Bintuhan per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014 adalah sebesar Rp. 1.957.106.218 dan Rp. 1.894.865.783.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp. 62.972.929 atau sebesar 3,32 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2014. Kenaikan belanja pegawai tahun 2015 dikarenakan adanya penambahan pegawai baru berjumlah 2 (dua) orang.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2015	TA 2014	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	708,034,240	622,970,280	85,063,960	13.65
Belanja Pembulatan Gaji PNS	21,128	12,190	8,938	73.32
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	49,826,288	44,470,560	5,355,728	12.04
Belanja Tunj. Anak PNS	14,428,084	12,642,254	1,785,830	14.13
Belanja Tunj. Struktural PNS	11,050,000	11,050,000	0	0.00
Belanja Tunj. Fungsional PNS	876,475,000	948,245,000	-71,770,000	-7.57
Belanja Tunj. PPh PNS	105,647,472	117,087,699	-11,440,227	-9.77
Belanja Tunj. Beras PNS	45,065,760	38,716,800	6,348,960	16.40
Belanja Uang Makan PNS	132,320,000	87,666,000	44,654,000	50.94
Belanja Tunjangan Umum PNS	14,245,000	11,275,000	2,970,000	26.34
Total Belanja Brutto	1,957,112,972	1,894,135,783	62,977,189	3.32
Pengembalian Belanja	6,754	2,494	9,248	170.81
Total Belanja Netto	1,957,106,218	1,894,133,289	62,972,929	3.32

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang : Rp.
420.528.750

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Bintuhan per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014 adalah sebesar Rp. 420.528.750 dan Rp. 438.006.300.

Realisasi Belanja Barang TA 2015 mengalami penurunan sebesar (3,99) persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2014. Penurunan tersebut dikarenakan naiknya anggaran belanja barang operasional.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2015	REALISASI TA 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	161,914,000	159,291,950	1.65
Belanja Barang Non Operasional	27,934,000	36,460,000	(23.38)
Belanja Jasa	14,986,000	17,830,500	(15.95)
Belanja Pemeliharaan	65,468,000	100,145,000	(34.63)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	129,926,750	124,278,850	4.54
Belanja Barang Persediaan	20,300,000	-	-
Jumlah Belanja Kotor	420,528,750	438,006,300	(3.99)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	420,528,750	438,006,300	(3.99)

Belanja

Modal Rp

422.407.740

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 422.407.740 dan Rp 0 . Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan TA 2014 disebabkan oleh implementasi akuntansi berbasis akrual.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	273,057,740	0	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	149,350,000	0	0.00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	422,407,740	0	0.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	422,407,740	0	0.00

Belanja Modal Peralatan dan mesin, dan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan mengalami kenaikan karena pada tahun 2014 tidak ada belanja modal.

B.2.4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2015 adalah sebesar Rp 273.057.740, mengalami kenaikan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2014 sebesar Rp0. Hal ini disebabkan oleh penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas kantor berupa gorden, meubelair dan kendaraan dinas berupa sepeda motor 1 unit.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI TA 2015	REALISASI TA 2014	NAIK (TURUN) %
Gorden	57,785,640	0	100.00
Meubelair	199,106,900	0	100.00
Kendaraan Roda 2	16,165,200		
Jumlah Belanja Kotor	273,057,740	0	100.00
Pengembalian	-	-	0.00
Jumlah Belanja	273,057,740	0	100.00

B.2.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2015 adalah sebesar Rp 273.057.740, mengalami kenaikan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2014 sebesar Rp0. Hal ini disebabkan oleh penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas kantor berupa Jaringan dan instalasi listrik dan pengadaan server.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI TA 2015	REALISASI TA 2014	NAIK (TURUN) %
Jaringan dan Instalasi Listrik	49,500,000	0	100.00
Server	99,850,000	0	100.00
Jumlah Belanja Kotor	149,350,000	0	100.00
Pengembalian	-	-	0.00
Jumlah Belanja	149,350,000	0	100.00

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar: Rp.
3.868.000*

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.868.000 dan Rp. 1.163.000.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Bintuhan per 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 12 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2015	TA 2014
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	3.868.000	1.163.000
Total Aset Lancar	3.868.000	1.163.080

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 13 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2015	31 Desember TA 2014
		0	0
		0	0
Jumlah		0	0

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar
di Muka: Rp. 0*

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 4.477.080. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Tabel 14 Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2015	31 Desember TA 2014
1.	Persekot/uang muka gaji		4.477.080
Jumlah		0	4.477.080

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 4.477.080. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

C.1.3. Persediaan

*Persediaan: Rp.
3.868.000*

Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.868.000 dan Rp. 1.163.000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember 2014

No.	Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014
1	Barang Konsumsi	3.868.000	1.163.000
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		5.603.000	1.163.000

Hasil dari opname fisik persediaan bulan Desember Tahun 2015 adalah :

No	Nama Barang	Jumlah	Total	Kondisi
1	Spidol	2	20,000	Baik
2	Pena Biasa	1	25,000	Baik
3	Pena Tizo Zebra	1	95,000	Baik
4	Pena Balliner	3	60,000	Baik
5	Buku Folio 200 L	13	390,000	Baik
6	Buku Ekspedisi	4	60,000	Baik
7	Buku Kwarto	10	150,000	Baik
8	Box File	5	150,000	Baik
9	Map Plastik	1	8,000	Baik
10	Odner	11	275,000	Baik
11	Lem Kertas	5	50,000	Baik
12	Kertas HVS Folio	4	200,000	Baik
13	Amplop Putih Biasa	2	40,000	Baik
14	Amplop Casing Kecil	1	25,000	Baik
15	KERTAS FILM FAX	3	195,000	Baik
16	Tinta Printer HP	2	90,000	Baik
17	Tinta Blue Printer	4	220,000	Baik
18	Flash Disk	3	300,000	Baik
19	Cartridge	6	1,500,000	Baik
20	Baterai Kecil	1	15,000	Baik
Jumlah			3,868,000	

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp.
6.394.762.611*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 tersaji sebesar Rp. 6.394.762.611 dan Rp. 7.444.152.975. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 16 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2015	TA 2014	Perubahan
1	Tanah	306.034.347	205.334.347	100.700.000
2	Peralatan dan Mesin	1.445.628.368	1.172.570.628	273.057.740
3	Gedung dan Bangunan	6.066.248.000	6.066.248.000	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	149.350.000	0	149.350.000
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Jumlah		7.967.260.715	7.444.152.975	523.107.740

Akumulasi Penyusutan	(1.572.498.104)	(1.233.694.597)	(338.803.507)
Nilai Buku Aset Tetap	6.394.762.611	6.210.458.378	(184.304.233)

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp.
306..334.347

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 306.034.347 dan Rp. 205.334.347.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 17 Rincian Saldo Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014	205,334,347
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk Berupa Tanah	100,700,000
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Saldo per 30 November 2015	306,034,347

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

No	Luas	Lokasi	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan
1	41.301m ²	Jl. Pengadilan - Padang Kempas Bintuhan	BK 267919	Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung	Kantor Pengadilan
2	1007m ²	Jl. Merdeka Barat Bintuhan	06/KS	Kementerian/Lembaga	Zitting Plaatz
Jumlah					

Pengadilan Negeri Bintuhan mendapatkan penambahan dari Pengadilan Negeri Manna berupa tanah Zitting Plaatz seluas 1.007m² senilai Rp. 100.700.000,-

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin : Rp.
1.445.628.368

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.445.628.368 dan Rp. 1.172.570.628.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014	1,172,570,628
Mutasi tambah:	
Pembelian	273,057,740
Hibah Barang	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2015	1,445,628,368
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	(989,691,954)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	455,936,414

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Pembelian gorden kantor Rp. 57.785.640,-
- Pembelian mebeulair Rp. 199.106.900
- Pembelian kendaraan dinas roda 2 Rp. 16.165.200,-

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.445.628.368 dan Rp. 1.172.570.628.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
6.066.248.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.066.248.000 dan Rp. 5.676.033.040.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Oktober 2014	6.066.248.000
Mutasi Tambah	
	0
Mutasi Kurang	
	0
Saldo per 31 Desember 2015	6.066.248.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2015	(572.202.400)
Nilai Buku 31 Desember 2015	5.494.045.600

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 2014

masing-masing adalah sebesar Rp. 6.066.248.000 dan Rp. 6.066.248.000.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp.
149.350.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 149.350.000 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Oktober 2014	0
Mutasi Tambah	
	149.350.000
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2015	149.350.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2015	(10.603.750)
Nilai Buku 31 Desember 2015	138.746.250

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 149.350.000 dan Rp. 0., Saldo tersebut terdiri dari Jaringan Listrik dan Server.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp. 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Oktober 2014	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	

Saldo per 31 Desember 2015	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2015	0
Nilai Buku 31 Desember 2015	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp.
0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp. 0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0.

Aset Lainnya:
Rp. 8.212.403

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 8.212.403 dan Rp. 18.393.585. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Tabel 18 Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2015	TA 2014
1	Aset tak Berwujud	0	0
2	Aset Lain-lain	72.773.943	72.773.943
	Nilai perolehan Aset Lainnya	72.773.943	72.773.943
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(64.561.540)	(54.380.357)
	Nilai buku Aset Lainnya	8.212.403	18.393.585

C.4.1. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :
Rp. 72.773.943*

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 72.773.943 dan Rp. 72.773.943. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Bintuhan serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2014	72.773.943
Mutasi Tambah	

Mutasi Kurang	
---------------	--

Saldo per 31 Desember 2015	72.773.943
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2015	0
Nilai Buku 31 Desember 2015	0

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 72.773.943 dan Rp. 72.773.943. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Bintuhan serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi kurang merupakan penghentian penggunaan berupa mesin ketik 4 buah, alat pendingin lainnya 2 buah, stabilizer/ups 6 buah, stavol 6 buah, laptop 2 buah, printer 7 buah, hardisk eksternal 2 buah, yang sudah dalam kondisi rusak berat senilai Rp 72.773.943 dan direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp. 0*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 11.100.924. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. , sedangkan per 31 Desember TA 2014 tercatat sebesar Rp. 11.100.924

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Bintuhan per 31 Desember 2015

disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 19. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2015	TA 2014
Utang Kepada Pihak Ketiga	0	11.100.924
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	0	11.100.924

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp. 0

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 11.100.924. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Negeri Bintuhan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
Jumlah		0	

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN:
Rp. 0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp.
6.406.843.014*

Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp6.406.843.014 dan Rp6.223.391.120. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2015 tidak terdapat perubahan nilai Kewajiban. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0,-

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNbp : Rp.
4.477.080*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp.4.477.080 dan Rp746.180. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBp per 31 Desember TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	4.477.080	4.477.080	100,00
Total Pendapatan			4.477.080	100,00

Pembayaran Persekot gaji An.Asep Koswara,SH.,HM. Senilai Rp.373.090,- selama 12 bulan dalam tahun 2015.

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai :
Rp.
1.950.482.374*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.1.950.482.374 dan Rp.1.893.865.783. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 37 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2015	TA 2014	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	711,743,396	622,970,280	88,773,116	14.25
Beban Pembulatan Gaji PNS	21,128	12,190	8,938	73.32
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	49,826,288	44,470,560	5,355,728	12.04
Beban Tunj. Anak PNS	14,428,084	12,642,254	1,785,830	14.13
Beban Tunj. Struktural PNS	11,050,000	11,050,000	-	0.00
Beban Tunj. Fungsional PNS	876,475,000	948,245,000	(71,770,000)	-7.57
Beban Tunj. PPh PNS	105,647,472	117,087,699	(11,440,227)	-9.77
Beban Tunj. Beras PNS	45,065,760	38,718,800	6,346,960	16.39
Beban Uang Makan PNS	121,987,000	87,666,000	34,321,000	39.15
Beban Tunjangan Umum PNS	14,245,000	12,005,000	2,240,000	18.66
Total Belanja Bruto	1,950,489,128	1,894,867,783	55,621,345	2.94
Pengembalian Belanja	(6,754)	(732,494)	725,740	-99.08
Total Belanja Bruto	1,950,482,374	1,895,600,277	54,895,605	2.90

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp. 16.435.000,-

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.16.435.000,- dan Rp0 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2015	TA 2014	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	16.385.000	0	0	0
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	50.000	0	0	0
Total Beban Persediaan	16.385.000	0	0	0

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa : Rp.204.834.000

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 204.834.000 dan Rp.0 Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	187,348,000	-	-
Beban Langganan Daya dan Jasa	14,586,000	-	-
Beban Jasa Pos dan Giro	2,500,000	-	-
Beban Jasa Lainnya	400,000	-	-
Jumlah	204,834,000	-	-

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp.66.628.000*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 66.628.000 dan Rp.0 Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11,000,000	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	54,468,000	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	1,160,000	-	-
Jumlah	66,628,000	-	-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan Dinas
: Rp.
129.926.750*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.129.926.750 dan Rp.0 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	129,926,750	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	-	-
Jumlah	129,926,750	-	-

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat : Rp.*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014.

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp.*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi :
Rp.348.984.690*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.348.948.690. dan Rp.0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

**Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014
(dalam satuan Rupiah)**

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	206,874,797	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	121,324,960	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	10,603,750	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan	10,181,183	-	-
Jumlah Penyusutan	348,984,690	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	348,984,690	-	-

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp.*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014.

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain :
Rp.*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014.

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non Operasional
: Rp.*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014.

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp.*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar
Rp.
6.223.391.120 Rp.6.223.391.120

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit)
LO : Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah
Rp.(2.712.813.734) sebesar Rp.(2.712.813.734) dan Rp.0 Defisit LO merupakan selisih kurang antara
4) surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan : Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena
Rp.0 kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

E.4. Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset
Tetap : Rp.0 Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

E.5. Koreksi atas Beban

Koreksi Aset
Beban : Rp0 Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

E.6. Koreksi atas Pendapatan

*Koreksi atas
Pendapatan : Rp*

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015.

E.7. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir :
Rp.6.406.843.01
4*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.406.843.014 dan Rp 0.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Terdapat belanja pegawai dibayar dimuka/persekot gaji sebesarRp. 4.477.080 sisa pembayaran sebanyak 12 kali Rp. 373.090 tahun 2015 sampai dengan bulan Desember RP. 4.477.080,-.
2. Pembayaran uang makan bulan Desember 2014 pada tahun anggaran 2015.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Bintuhan adalah:

1. BRI UNIT BANDAR BINTUHAN A/C 5684.01.000085.30.0 a.n. BPg 121 Pengadilan Negeri Bintuhan yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.0. PENGELOLAAN DIPA 01 (BUA).
2. BRI UNIT BANDAR BINTUHAN A/C 5684.01.000105.30.4 a.n. BPg 121 Pengadilan Negeri Bintuhan yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.0. PENGELOLAAN KEUANGAN DIPA 03.
3. BRI UNIT BANDAR BINTUHAN A/C 5684.01.000089.30.4 a.n. PENGADILAN NEGERI BINTUHAN yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.0. PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA.

F.2.4. Revisi DIPA

Revisi DIPA ke satu tanggal 08 Mei 2015 : Nomor W8-U5/39/KU.01.10/V/2015 mengenai Ralat atau penambahan akun persediaan dan Ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam Halaman III DIPA.

Revisi POK Pertama tanggal 18 Juni 2015 : Nomor W8-U5/42/KU.01.10/VI/2015 mengenai dan ralat/penambahan kode akun persediaan.

Revisi POK Kedua tanggal 29 Juni 2015 : Nomor W8-U5/52/KU.01.10/VI/2015 mengenai ralat kode akun pita cukai, materai dan leges..

Revisi POK Ketiga tanggal 13 Oktober 2015 : Nomor W8-U5/55/KU.01.10/X/2015 mengenai ralat kode akun bbm ke akun semula.

Revisi POK Ketiga tanggal 01 Desember 2015 : Nomor W8-U5/55/KU.01.10/XII/2015 mengenai ralat kode akun persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin, kode akun persediaan peralatan gedung dan bangunan kembali ke akun semula, dan revisi pagu minus pegawai.

F.2.5. Rekening titipan Pihak Ketiga

Tidak ada rekening titipan pihak ketiga dalam laporan keuangan ini.

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Ralat SPM ke satu tanggal 07 Mei 2015 : Nomor W8.U5/37/KU.01.10/V/2015 mengenai akun belanja barang persediaan akun 522151 menjadi akun 521811 dan 521211.

Nomor SPM	: 00025/672994/03/2015	Tanggal SPM	: 23-03-2015
Nomor SP2D	: 151211301001703	Tanggal SP 2D	: 25-03-2015
Nomor SPM	: 00027/672994/03/2015	Tanggal SPM	: 23-03-2015
Nomor SP2D	: 151211301001705	Tanggal SP2D	: 25-03-2015
Nomor SPM	: 00020/672994/UP/3/2014	Tanggal SPM	: 03-03-2014
Nomor SP2D	: 151211301001250	Tanggal SP2D	: 25-03-2014
Nomor SPM	: 00018/672994/UP/3/2015	Tanggal SPM	: 03-03-2015
Nomor SP2D	: 151211301001248	Tanggal SP2D	: 05-03-2015

Nomor SPM	: 00015/672994/UP/2/2014	Tanggal SPM	: 10-02-2015
Nomor SP2D	: 151211301000677	Tanggal SP2D	: 11-02-2015
Nomor SPM	: 00011/672994/UP/I/2015	Tanggal SPM	: 10-02-2015
Nomor SP2D	: 151211301000675	Tanggal SP2D	: 11-02-2015

Ralat SPM ke dua tanggal 18 Mei 2015 : Nomor W8.U5/45/KU.01.10/V/2015 mengenai akun belanja barang persediaan akun 522151 menjadi akun 521811 dan 521211.

Nomor SPM	: 00025/672994/03/2015	Tanggal SPM	: 23-03-2015
Nomor SP2D	: 151211301001703	Tanggal SP2D	: 25-03-2015
Nomor SPM	: 00027/672994/03/2015	Tanggal SPM	: 23-03-2015
Nomor SP2D	: 151211301001705	Tanggal SP2D	: 25-03-2015
Nomor SPM	: 00020/672994/UP/3/2014	Tanggal SPM	: 03-03-2014
Nomor SP2D	: 151211301001250	Tanggal SP2D	: 25-03-2014
Nomor SPM	: 00018/672994/UP/3/2015	Tanggal SPM	: 03-03-2015
Nomor SP2D	: 151211301001248	Tanggal SP2D	: 05-03-2015
Nomor SPM	: 00015/672994/UP/2/2014	Tanggal SPM	: 10-02-2015
Nomor SP2D	: 151211301000677	Tanggal SP2D	: 11-02-2015
Nomor SPM	: 00011/672994/UP/I/2015	Tanggal SPM	: 10-02-2015
Nomor SP2D	: 151211301000675	Tanggal SP2D	: 11-02-2015
Nomor SPM	: 00054/672994/UP/2/2014	Tanggal SPM	: 05-06-2015
Nomor SP2D	: 1151211301003936	Tanggal SP2D	: 08-06-2015
Nomor SPM	: 00041/672994/UP/2014	Tanggal SPM	: 19-05-2015
Nomor SP2D	: 151211301003365	Tanggal SP2D	: 20-05-2015

Ralat SPM ketiga tanggal 29 Juni 2015 : Nomor W8.U5/52/KU.01.10/VI/2015 Terkait pengguna akun persediaan materai 521813.

Nomor SPM	: 00011/672994/UP/I/2015	Tanggal SPM	: 10-02-2015
Nomor SP2D	: 151211301000675	Tanggal SP2D	: 11-02-2015

Ralat ke empat tanggal 12 oktober 2015 : Nomor W8.U5/53/KU.01.10/VI/2015 Terkait Dilakukan untuk memindahkan pembebanan akun 523122 pembelian bbm ke 522111.

Nomor SPM	: 00025T/672994/2015	Tanggal SPM	: 23-03-2015
Nomor SP2D	: 151211301001703	Tanggal SP2D	: 25-03-2015

Ralat ke lima tanggal 02 November 2015 : Nomor W8.U5/82/KU.01.10/XI/2015 terkait akun pembalik listrik ke perawatan.

Nomor SPM	: 00041T/672994/2015	Tanggal SPM	: 19-005-2015
Nomor SP2D	: 151211301003365	Tanggal SP2D	: 20-05-2015
Nomor SPM	: 00054T/672994/2015	Tanggal SPM	: 05-06-2015
Nomor SP2D	: 151211301003936	Tanggal SP2D	: 08-06-2015
Nomor SPM	: 00058T/672994/2015	Tanggal SPM	: 01-07-2015
Nomor SP2D	: 151211301004969	Tanggal SP2D	: 07-07-2015
Nomor SPM	: 00094/672994/UP/IX/2015	Tanggal SPM	: 22-09-2015
Nomor SP2D	: 151211301007460	Tanggal SP2D	: 28-09-2015

Ralat ke enam tanggal 14 Desember 2015 : Nomor W8.U5/91/KU.01.10/XI/2015 terkait pemindahan akun persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin, akun persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan ke akun semula.

Nomor SPM	: 00020/672994/UP/03/2015	Tanggal SPM	: 03-03-2015
Nomor SP2D	: 151211301001250	Tanggal SP2D	: 05-03-2015
Nomor SPM	: 00055T/672994/2015	Tanggal SPM	: 05-06-2015
Nomor SP2D	: 151211301003935	Tanggal SP2D	: 08-06-2015

Ralat ke tujuh tanggal 14 Desember 2015 : Nomor W8.U5/91/KU.01.10/XI/2015 terkait pengembalian akun persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin, akun persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan ke akun semula.

Nomor SPM	: 00020/672994/UP/03/2015	Tanggal SPM	: 03-03-2015
Nomor SP2D	: 151211301001250	Tanggal SP2D	: 05-03-2015

Nomor SPM	: 00055T/672994/2015	Tanggal SPM	: 05-06-2015
Nomor SP2D	: 151211301003935	Tanggal SP2D	: 08-06-2015

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Panitera/Sekretaris Nomor: W8.U5/ /KP.01.10/I/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Panitera/Sekretaris Nomor:W8.U5/254.A/KP.04.5/10/2015 Tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan tanggal 01 Oktober 2015 telah dilakukan penggantian Bendahara Penerimaan,

Semula:

Bendahara Penerimaan : Novriyani Kemala Dewi,ST

Menjadi:

Bendahara Penerimaan : Listika Rahma Dania,SH

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Bintuhan

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2015

A.	Peralatan dan Mesin		1,451,251,568	992,503,554	458,748,014
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	235,354,851	188,388,439	46,966,412
2	Alat Kantor	5	182,285,777	102,404,011	79,881,766
3	Alat Rumah Tangga	5	587,004,404	343,299,130	243,705,274
4	Alat Studio	5	6,018,648	4,416,784	1,601,864
5	Alat Komunikasi	5	9,350,000	8,765,000	585,000
6	Peralatan Pemancar	10	74,985,000	26,244,750	48,740,250
7	Alat Kedokteran	5	33,361,209	30,025,107	3,336,102
8	Unit Alat Laboratorium	8	3,051,648	1,716,552	1,335,096
9	Alat Khusus Kepolisian	4	2,850,000	2,850,000	-
10	Komputer Unit	4	226,613,623	216,382,373	10,231,250
11	Peralatan Komputer	4	50,576,408	50,101,408	475,000
12	Alat Kerja Penerbangan	10	39,800,000	17,910,000	21,890,000
B.	Gedung dan Bangunan				
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	5,481,300,000	542,955,000	4,938,345,000
2	Tugu/tanda Batas	50	584,948,000	29,247,400	555,700,600
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
1	Instalasi Lain		99,850,000	9,985,000	89,865,000
2	Jaringan Listrik		49,500,000	618,750	48,881,250
D.	Aset Tetap Lainnya				
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan		72,773,943	64,561,540	8,212,403
1	Alat Kantor	5	9,669,661	9,102,696	566,965
2	Alat Rumah Tangga	5	789,694	710,726	78,968
3	Unit Alat Laboratorium	8	13,409,082	7,542,612	5,866,470
4	Alat Khusus Kepolisian	4	3,809,082	3,809,082	-
5	Komputer Unit	4	19,700,000	18,237,500	1,462,500
6	Peralatan Komputer	4	25,396,424	25,158,924	237,500
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap				1,399,373,890	
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya				1,463,935,430	